

## DAFTAR PUSTAKA

- Alik, I., & Widjaya, L. (2016). Hubungan Ketepatan Kode Diagnosis Obsetric RSUD Sawerigading Kota Palopo Sulawesi Selatan. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan*.
- Ardhitya, t. (2015). Faktor-faktor yang Melatar Belakang Penolakan Klaim BPJS oleh Verifikator BPJS diRSUD DR.Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah. *Manajemen Informasi Kesehatan*.
- Budi, C. (2011). *Manajemen Unit Kerja Rekam Medis*. Yogyakarta: Quantum Sinergis Media.
- Burgos, M., Johnson, D., & Keogh, J. (2016). In *Medical Billing and Coding Demystified Hard Stuff made easy* (p. 98). United States of Amerika: Mc Graw Hill Education.
- Departemen Kesehatan RI. (2008). *Panduan Petunjuk Teknis Administrasi Klaim dan Verifikasi Program Jaminan Kesehatan*. Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI. (2006). *Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah sakit di Indonesia Revisi II. Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik*. Jakarta
- Departemen Kesehatan RI. (2008). *Panduan Praktis Admistrasi Klaim fasilitas Kesehatan*. Jakarta.
- Hartati, S. T. (2016). Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Kesehatan (SJSN) Di Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Tulang Bawang. *rekam medis dan informasi kesehatan*, 2.
- Hatta, G. R. (2014). In *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan disarana Pelayanan Kesehatan* (pp. 73-150). Jakarta: UI Press.
- Hidayah, N. (2014). Analisa Keakuratan Kode Diagnosa Utama Pada Pasien BPJS yang tidak Terverifikasi di Rumah Sakit Permata Medika Semarang pada bulan Januari. *Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*, 8.
- Ilyas, Yaslis. (2006). Mengenali Kesehatan, Review Utilitasi, Manajemen Klaim dan Fraud (Kecurangan Asuransi Kesehatan). *Kesehatan Masyarakat*.

- Irmawati, Sugiharto, Susanto, E., & Astrianingrum, M. (2016). Faktor-faktor Penyebab Pengembalian Berkas Klaim Rawat Inap oleh Verifikator BPJS Kesehatan di RSUD Tugurejo . *Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*, 128.
- Kepmenkes. (2014). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 337 Tentang Standar profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan*. Jakarta.
- M.A, H. (2005). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Pelajar Surabaya.
- Menkes. (2008). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III Tentang Rekam Medis*. Jakarta.
- Menkes. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tentang Petunjuk Teknis Sistem Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs)*. Jakarta.
- Menkes. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional*. Jakarta.
- Organization, W. H. (2010). *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems Volume 2 list Tent Revision*. Geneva: World Health Organization.
- Susan, o., Arso, P., & Wigati, A. (2016). Analisis Administrasi Klaim Jaminan Kesehatan Nasional Rawat Inap RSUD Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 40.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12. (2013). *Tentang Jaminan Kesehatan*. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24. (2011). *Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36. (2014). *Tentang Tenaga Kesehatan*. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40. (2004). *Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta.
- Widjaya, L. (2015). *Modul IA Pengantar Manajemen Informasi Kesehatan (MIK)*. Jakarta Barat: Universitas Esa Unggul.

Widjaya, L. (2015). *Modul Audit Pendokumentasian Rekam Medis*. Jakarta Barat:  
Universitas Esa Unggul.



Universitas  
**Esa Unggul**



Universitas  
**Esa Unggul**



Universitas  
**Esa Unggul**